



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : R MACHMUD SUGANDI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN I BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 870529

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.160.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m<sup>2</sup>/207 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 397.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 34.000.000

**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. 18.990.000

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 97.502.363

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.707.492.363



III. HUTANG

Rp. 112.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.595.492.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.